

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA								
No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT KERJA YANG Menguasai	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP
					CETAK	REKAM	ONLINE	
1.	Target dan Realisasi Investasi Tahun 2019 s.d 2027	Bidang Penanaman Modal	Koordinator Penanaman Modal	2024	√		√	Selama Berlaku
2.	Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2024	Bidang Penanaman Modal	Koordinator Penanaman Modal	2024	/		/	1 Tahun
3.	Buku Peta Potensi dan Peluang Investasi Pulau Belitung Tahun 2027	Bidang Penanaman Modal	Koordinator Penanaman Modal	2024	/		/	Selama Berlaku
4.	Uraian Hasil Pemeriksaan Tahun 2023	Koordinator Keuangan	Sekretaris	2024	/		/	1 Tahun
5.	Rekapitulasi Barang Ke Neraca Tahun 2023	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	1 Tahun
6.	Rekonsiliasi Barang Tahun 2023	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	1 Tahun
7.	Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku
8.	Tata cara memperoleh Informasi Publik	Kepala Subag Umum	Koordinator PTSP	2023	/		/	Selama Berlaku

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SETIAP SAAT								
No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP
					CETAK	REKAM	ONLINE	
1	Daftar Informasi Publik (DIP) Berisi informasi Daftar Informasi tahun 2024 yang diumumkan secara berkala, setiap saat dan informasi serta merta	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2024	/		/	Selama Berlaku
2	Kebijakan Badan Publik Informasi Tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku
3	SOP Permohonan Informasi Publik	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku
4	SOP Keberatan Informasi Publik	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku
5	SOP Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku
6	SOP Penetapan Daftar Informasi Publik	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku
7	SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku
8	SOP Pembuatan dan Pemuatan Press Release	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku
9	SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku
10	Tata Cara Permohonan Informasi Publik Melalui PPID Pembantu	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku
11	Tata Cara Pengajuan Keberatan Dalam Permohonan Informasi Publik	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku

12	Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku
13	Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan wewenang Pejabat Badan Publik	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku
14	Laporan Jumlah Informasi yang diterima	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku
15	Waktu Pelayanan PPID DPMPTSP	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku
16	SK Penunjukan PPID Pembantu DPMPTSP Tahun 2023	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku
17	Struktur PPID DPMPTSP	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku
18	Laporan Sosialisasi PPID	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku
19	Laporan PPID	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku
20	Sarana dan Prasarana PPID DPMPTSP	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku
21	Formulir Permohonan Informasi	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku
22	Formulir atas Keberatan atas Permohonan Informasi	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku
23	Daftar Registrasi Permohonan Informasi	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku
24	Laporan Naskah Petimbangan Hasil Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku
25	Laporan Standar Biaya Perolehan Informasi	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	/		/	Selama Berlaku
26	Data Izin Agustus 2023	Bidang Pelayanan Perizinan	Koordinator Pelayanan Perizinan	2023	/		/	Selama Berlaku

27	Data Izin September 2023	Bidang Pelayanan Perizinan	Koordinator Pelayanan Perizinan	2023	/		/	Selama Berlaku
28	Data Izin Oktober 2023	Bidang Pelayanan Perizinan	Koordinator Pelayanan Perizinan	2023	/		/	Selama Berlaku
29	Data Izin November 2023	Bidang Pelayanan Perizinan	Koordinator Pelayanan Perizinan	2023	/		/	Selama Berlaku
30	Data Izin Desember 2023	Bidang Pelayanan Perizinan	Koordinator Pelayanan Perizinan	2023	/		/	Selama Berlaku
31	Data Izin Januari 2024	Bidang Pelayanan Perizinan	Koordinator Pelayanan Perizinan	2024	/		/	Selama Berlaku
32	Data Izin Februari 2024	Bidang Pelayanan Perizinan	Koordinator Pelayanan Perizinan	2024	/		/	Selama Berlaku
33	Izin Pendirian Tempat Layanan Khusus Disabilitas Layanan Tumbuh Kembang Anak	Bidang Pelayanan Perizinan	Koordinator Pelayanan Perizinan	2024	/		/	Selama Berlaku
34	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PT.Enseval Putera Megatrading tbk	Bidang Pelayanan Perizinan	Koordinator Pelayanan Perizinan	2024	/		/	Selama Berlaku
35	Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan	Bidang Pelayanan Perizinan	Koordinator Pelayanan Perizinan	2024	/		/	Selama Berlaku
36	Perizinan Penyedia Jasa Boga Periode Tertentu	Bidang Pelayanan Perizinan	Koordinator Pelayanan Perizinan	2024	/		/	Selama Berlaku
37	Perizinan Penelitian	Bidang Pelayanan Perizinan	Koordinator Pelayanan Perizinan	2024	/		/	Selama Berlaku
38	Kartu Pengawasan Angkutan Bus Dalam Trayek lainnya	Bidang Pelayanan Perizinan	Koordinator Pelayanan Perizinan	2024	/		/	Selama Berlaku

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA								
No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT KERJA YANG Menguasai	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP
					CETAK	REKAM	ONLINE	
1								
2								

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN					
NO	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1	Data Pribadi Pegawai	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	- Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
2	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Memperlancar proses penegakan hukum - Menjaga rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada keputusan tetap
3	Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	- Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
4	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	- Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
5	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	- Data mengganggu proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan penyerahan SK

6	Instrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja
7	Daftar Nilai DP3 PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
8	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
9	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
10	Data Keuangan yang belum dilakukan audit DPMPTSP	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan	- Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik
11	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	- Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	- Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai diketahui pemenangnya
12	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	- Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya

13	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran	Selama proses pengadaan barang dan jasa
14	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Negara	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya Dok Pertanggungjawab Keuangan Negara yang telah diaudit
15	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
16	Data nama perusahaan, alamat dan nomor telepon pemilik perusahaan yang mengajukan izin usaha	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	- Mengungkap rahasia pribadi seorang	- Melindungi rahasia pribadi seorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik

Ditetapkan di Pangkalpinang

Tanggal: 20 Mei 2024

Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

